

Dampak Positif Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Terhadap Ekonomi dan Sosial Masyarakat Perbatasan Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

Sri Hani¹, Sumar'in², Maskupah³

^{1,2,3} Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,

e-mail: srihanibagastari26@gmail.com¹, sumarinasmawi@gmail.com²,
maskupah.usu@gmail.com³

ABSTRACT

The construction of the Aruk Cross-Border Post (PLBN) in Sebunga Village, Sajingan Besar District, Sambas Regency, is a strategic government effort to strengthen development in border areas. The presence of the Aruk PLBN has shown various positive impacts, especially on the economic and social aspects of the community. This study aims to analyze the positive impact of the Aruk PLBN construction on the economy and social life of border communities from an Islamic development economics perspective. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with PLBN managers, village officials, traders, and border communities. The results show that the construction of the Aruk PLBN has had positive impacts in the form of increased accessibility, local economic growth, increased business opportunities, additional public facilities, and increased social interaction. From an Islamic development economics perspective, the existence of the PLBN is in line with the principles of benefit, equality, and improving the quality of life of the community. Supporting factors include infrastructure quality, availability of commercial facilities, government support, technology and information, and community involvement. Inhibiting factors include poor communication quality, suboptimal bureaucracy, and the emergence of illegal trade.

Keywords: Aruk PLBN; Border Economy; Social Impact.

ABSTRAK

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan. Keberadaan PLBN Aruk menunjukkan berbagai dampak positif terutama pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak positif pembangunan PLBN Aruk terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat perbatasan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola PLBN, aparat desa, pedagang, serta masyarakat perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLBN Aruk memberikan dampak positif berupa

peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatnya peluang usaha, bertambahnya fasilitas publik, serta meningkatnya interaksi sosial masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, keberadaan PLBN sejalan dengan prinsip maslahat, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adapun faktor pendukung meliputi kualitas infrastruktur, ketersediaan fasilitas komersial, dukungan pemerintah, teknologi dan informasi, serta keterlibatan masyarakat. Faktor penghambat meliputi minimnya kualitas komunikasi, birokrasi yang belum optimal, serta munculnya perdagangan ilegal.

Kata kunci: BN Aruk; Ekonomi Perbatasan; Dampak Sosial

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan merupakan kawasan yang memiliki karakteristik strategis baik dalam aspek keamanan, ekonomi, maupun sosial. Banyak wilayah perbatasan di Indonesia masih menghadapi persoalan keterisolasian, ketertinggalan infrastruktur, dan keterbatasan ekonomi, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat fungsi perbatasan. Dalam konteks ini, (Perbatasan), (2023) menyatakan bahwa PLBN Aruk adalah “simbol dan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang dibangun untuk memperkuat pelayanan lintas batas serta fungsi ekonomi masyarakat.”

PLBN Aruk di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, berfungsi tidak hanya sebagai pos pemeriksaan imigrasi, bea cukai, dan karantina, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam dokumen resmi, disebutkan bahwa PLBN Aruk “dapat ditempuh kurang lebih 8 jam perjalanan darat dari Kota Pontianak... dan 1,5 hingga 2 jam dari pusat Kota Sambas” (Perbatasan), (2023). Hal ini menunjukkan bahwa PLBN Aruk merupakan infrastruktur strategis yang menghubungkan pusat ekonomi kabupaten dan provinsi dengan wilayah perbatasan.

Sebelum PLBN Aruk dibangun, kondisi infrastruktur kawasan ini sangat tertinggal. (Faizah, 2023) menegaskan bahwa “akses menuju Aruk banyak yang rusak dan toko-toko hanya berupa bangunan sederhana.” Namun setelah PLBN difungsikan, terjadi peningkatan signifikan terutama pada perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas publik. Infrastruktur pendukung seperti Pasar Wisata Aruk, jaringan internet, dan layanan keuangan kini tersedia sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan aktivitas ekonomi masyarakat.

Keberadaan PLBN Aruk memberikan dampak positif pada aksesibilitas dan distribusi sarana publik. (Firdaus, 2021) menyatakan bahwa pembangunan PLBN membuat masyarakat “lebih mudah mengakses sarana pendidikan, sarana ibadah, dan sarana transportasi,” serta mempercepat distribusi barang melalui layanan pos dan kargo. Perbaikan akses tersebut berimplikasi langsung pada peningkatan mobilitas masyarakat dan kemudahan memperoleh kebutuhan pokok.

Dalam perspektif ekonomi makro, PLBN Aruk memainkan peran strategis sebagai pintu resmi ekspor-impor antara Indonesia dan Malaysia. Dokumen penelitian mencatat bahwa PLBN merupakan “pintu masuk-keluar

barang dalam kerangka perdagangan internasional” dan menjadi bagian penting dalam upaya menambah devisa negara serta membuka lapangan kerja baru (Negeri, 2022). Hal ini menunjukkan relevansi PLBN sebagai instrumen penguatan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi perbatasan.

Pada aspek sosial, PLBN Aruk mendorong peningkatan interaksi masyarakat lintas batas. (Sari, 2020) menjelaskan bahwa keberadaan PLBN mampu “meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi antar daerah.” Interaksi antarwarga negara melalui kegiatan perdagangan, pariwisata, dan mobilitas sosial memperkuat kohesi sosial dan membuka peluang pertukaran budaya yang positif.

Meskipun demikian, pembangunan PLBN Aruk belum sepenuhnya bebas dari hambatan. (Juanina, 2022) mencatat adanya “potensi migrasi ilegal dan kerawanan keamanan” sebagai konsekuensi meningkatnya arus keluar-masuk penduduk. Selain itu, koordinasi antarinstitusi masih lemah. Dalam laporan penelitian disebutkan bahwa pengelolaan PLBN “belum terjalin secara kesatuan, karena masing-masing instansi memiliki struktur organisasi sendiri sehingga mengacaukan koordinasi” (Juanina, 2022). Hambatan ini perlu ditangani agar optimalisasi PLBN dapat tercapai.

Dari perspektif ekonomi pembangunan Islam, pembangunan wilayah harus mengedepankan nilai kemaslahatan, keadilan, dan distribusi yang merata. (Mahri, 2021) menegaskan bahwa pembangunan harus “dikaitkan dengan pencapaian tujuan-tujuan kesejahteraan, bukan hanya peningkatan pendapatan.” Prinsip ini menuntut agar manfaat pembangunan PLBN Aruk tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga terciptanya pemerataan akses sumber daya, peningkatan kualitas sosial, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Temuan awal menunjukkan bahwa PLBN Aruk telah memberikan dampak sesuai prinsip ekonomi pembangunan Islam, terutama melalui peningkatan aksesibilitas, peluang usaha, dan penguatan hubungan sosial. Namun, masih terdapat persoalan seperti “ketimpangan akses sumber daya” dan “keterbatasan kompetensi masyarakat lokal” (Ananda & Kusnadi, 2019). Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pemberdayaan agar manfaat PLBN dapat dirasakan secara luas oleh seluruh kelompok masyarakat perbatasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian komprehensif mengenai dampak positif pembangunan PLBN Aruk terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman empiris mengenai kontribusi PLBN, tetapi juga memperkuat fondasi teoritis bagi perumusan kebijakan pembangunan perbatasan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN/RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai dampak positif pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan. Pendekatan kualitatif dipilih karena

mampu menggali fenomena sosial secara komprehensif melalui perspektif partisipan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola PLBN, aparat pemerintah desa, pedagang, serta masyarakat yang terdampak langsung pembangunan PLBN. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memahami konteks sosial dan aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan PLBN Aruk. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi terkait, serta literatur yang relevan.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengikuti teknik analisis Miles dan Huberman. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan terhadap fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk pola tematik untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel sosial dan ekonomi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yang melibatkan perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULTS AND DISCUSSION

A. Dampak Positif Pengembangan PLBN Aruk terhadap Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

Pengembangan PLBN Aruk menunjukkan dampak nyata dalam memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan melalui peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, peluang usaha, serta legalitas perdagangan. Berdasarkan data pengelola PLBN, pembangunan PLBN telah mendorong perubahan signifikan dalam mobilitas penduduk serta arus barang antarnegara. Masyarakat menyatakan bahwa setelah PLBN dibangun, aktivitas ekonomi meningkat terutama karena “perawatan dan pengelolaan aset sarpras imigrasi semakin baik, dan petugas melaksanakan tugas dengan baik”. Hal ini memperkuat fungsi PLBN sebagai pusat layanan sekaligus simpul distribusi perdagangan.

PLBN Aruk juga berperan dalam menekan ketergantungan masyarakat terhadap Malaysia. Sebelum PLBN berkembang, sebagian besar kegiatan perdagangan dilakukan melalui jalur tidak resmi, tetapi kini masyarakat mulai memanfaatkan jalur resmi karena prosedurnya lebih mudah dan fasilitas lebih lengkap. Hal ini tercermin dalam wawancara masyarakat yang menyebutkan bahwa “keberadaan PLBN sangat diperlukan sebagai fasilitas perbatasan yang memudahkan akses masuk dan keluar negara”. Dari perspektif ekonomi pembangunan Islam, perubahan ini menunjukkan tercapainya masalah berupa kemudahan akses, keamanan transaksi, dan perlindungan harta masyarakat.

Peningkatan aktivitas ekonomi terlihat dari munculnya usaha-usaha baru di sekitar PLBN, seperti jasa transportasi, kios makanan, perdagangan harian, dan aktivitas di Pasar Wisata Aruk. Pasar ini merupakan ruang ekonomi baru yang dibangun pemerintah Kabupaten Sambas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan perdagangan pelintas batas. Sebagian pedagang menyatakan bahwa keberadaan PLBN membuat lokasi pasar lebih strategis dibanding sebelum PLBN, karena peningkatan jumlah kunjungan dan mobilitas warga. Peningkatan konsumsi dan perdagangan ini selaras dengan prinsip *falāḥ* (kesejahteraan) dalam ekonomi Islam, di mana pembangunan

harus menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merugikan.

Selain dampak ekonomi langsung, PLBN Aruk memberikan pengaruh positif pada efisiensi distribusi barang dan penurunan harga. Data lapangan menunjukkan adanya peningkatan kelancaran arus logistik, termasuk melalui layanan pos, jasa pengiriman barang, dan mobilitas pedagang lintas batas. Masyarakat menyatakan bahwa “akses terhadap kebutuhan primer menjadi lebih mudah dan cepat dibandingkan sebelumnya”. Dalam ekonomi Islam, akses terhadap kebutuhan dasar merupakan elemen penting untuk memastikan pemerataan kesejahteraan dan mencegah ketimpangan sosial.

Dari perspektif sosial-ekonomi Islam, pembangunan PLBN Aruk juga mendukung integrasi sosial dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Aktivitas lintas batas yang meningkat menciptakan ruang interaksi sosial baru, yang menurut wawancara tokoh masyarakat “menambah peluang kerja sama ekonomi, membuka jaringan perdagangan, dan mengurangi isolasi masyarakat desa perbatasan”. Hal ini memperkuat prinsip ta'awun (kerja sama) dan ukhuwwah (kebersamaan) sebagai bagian dari pembangunan sosial dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PLBN Aruk memberikan dampak positif multidimensi sesuai nilai ekonomi pembangunan Islam: terciptanya kemaslahatan, keadilan akses, peningkatan pendapatan, peluang usaha, serta penguatan jaringan ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Dampak Positif Pengembangan PLBN Aruk terhadap Ekonomi Masyarakat

Aspek	Temuan Penelitian	Perspektif Ekonomi Islam
Peningkatan aktivitas ekonomi	Munculnya usaha baru, kenaikan aktivitas barang & jasa	Maslahah, keadilan distribusi
Pemenuhan kebutuhan pokok	Harga stabil, barang mudah diakses	Hifz al-mal, keadilan pasar
Kesempatan kerja	Pertambahan lapangan kerja formal & informal	Falah (kesejahteraan)
Peningkatan aksesibilitas	Jalan lebih baik & mobilitas meningkat	Taysir (kemudahan)

Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Data lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa pembangunan PLBN memberikan peluang usaha baru, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta perkembangan fasilitas ekonomi seperti pasar, kios, dan layanan transportasi. Salah seorang pedagang lokal menyatakan bahwa “sejak PLBN beroperasi, jumlah pengunjung di kawasan Aruk meningkat dan pendapatan kami jauh lebih stabil dibandingkan sebelum PLBN dibangun” (Wawancara Pedagang, 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan PLBN berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (growth pole) yang efektif.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian (Maisondra, 2019) terkait PLBN Entikong yang menegaskan bahwa keberadaan PLBN dapat

“meningkatkan arus perdagangan legal, mengurangi transaksi informal, dan memperluas peluang usaha lokal.” Demikian pula penelitian (Bara Lay & Wahyono, 2018) mengenai PLBN Motaain menyatakan bahwa pembangunan PLBN berdampak langsung pada munculnya sumber pendapatan baru di sektor perdagangan dan jasa. Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa pembangunan PLBN cenderung menghasilkan efek ekonomi mikro yang signifikan di wilayah perbatasan.

Peningkatan aksesibilitas juga menjadi salah satu dampak penting dari pengembangan PLBN Aruk. Perbaikan jalan dan fasilitas distribusi membuat barang kebutuhan lebih mudah diperoleh. Masyarakat Aruk menyebutkan bahwa “akses kebutuhan primer menjadi lebih cepat dan murah setelah fasilitas PLBN lengkap” (Wawancara Masyarakat, 2024). Temuan ini sejalan dengan prinsip taysir (kemudahan) dalam ekonomi Islam, yang mengutamakan penciptaan akses ekonomi yang adil dan efisien demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, dampak PLBN Aruk memenuhi unsur masalah karena memberikan manfaat yang nyata: peluang kerja meningkat, harga barang lebih stabil, dan masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap pasar dan jasa ekonomi. Prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) juga tercermin melalui pengurangan transaksi ilegal dan peningkatan keamanan perdagangan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Djumadi, 2016) bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada “keamanan ekonomi, keadilan, dan pemerataan manfaat pembangunan.”

Lebih jauh lagi, interaksi sosial-ekonomi yang meningkat akibat aktivitas lintas batas memperluas jaringan sosial dan kerja sama wilayah perbatasan. Tokoh masyarakat Aruk menegaskan bahwa “kehadiran PLBN membuka banyak peluang kerja sama dengan masyarakat Malaysia, baik dalam perdagangan maupun kegiatan sosial” (Wawancara Tokoh Masyarakat, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip *ta'āwun* (kerja sama) dan *ukhuwwah* (kebersamaan), yang merupakan fondasi penting dalam ekonomi sosial Islam.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan PLBN Aruk memberikan dampak positif yang kuat terhadap perekonomian perbatasan dan konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan Islam, terutama pada aspek kemaslahatan, keadilan akses, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan struktur ekonomi lokal

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan PLBN Aruk terhadap Perekonomian Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam

1. Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan PLBN Aruk didukung oleh beberapa faktor struktural dan sosial penting. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang memadai. Data lapangan menggambarkan bahwa bangunan PLBN yang modern dan terawat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Wawancara dengan pengelola menyatakan bahwa “bangunan PLBN sangat megah dan terawat, sehingga menciptakan kenyamanan bekerja di dalamnya”. Infrastruktur yang baik merupakan

prasyarat utama pembangunan ekonomi yang sesuai dengan prinsip efisiensi dalam Islam.

Faktor pendukung kedua adalah akses teknologi dan digitalisasi pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan lintas batas semakin efisien karena penggunaan sistem digital dalam pemeriksaan dokumen. Hal ini mempermudah proses ekspor-impor kecil, meminimalkan waktu antre, dan mengurangi biaya transaksi. Dalam perspektif Islam, efisiensi pelayanan ini mencerminkan prinsip *islāh* (perbaikan) dan *taysir* (kemudahan), yang menuntut agar pelayanan publik memberikan manfaat luas tanpa membebani masyarakat.

Ketiga, dukungan kebijakan pemerintah. Data dokumen menunjukkan bahwa PLBN Aruk menjadi bagian dari program nasional dalam memperkuat perbatasan sebagai “halaman depan negara”. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dukungan pemerintah juga terlihat melalui pelibatan masyarakat dalam berbagai kesempatan, seperti pembinaan UMKM dan pengembangan pasar wisata.

Faktor pendukung keempat adalah partisipasi masyarakat lokal yang menerima dan memanfaatkan momentum pembangunan. Wawancara pedagang menunjukkan bahwa banyak masyarakat mulai membuka kios, warung, dan jasa transportasi yang beroperasi di sekitar PLBN. Partisipasi ini mencerminkan semangat *tathwir* (pengembangan diri) dalam Islam, yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang pembangunan.

Tabel 2.

Faktor Pendukung Pengembangan PLBN Aruk

Faktor	Deskripsi	Dampak Ekonomi
Infrastruktur PLBN	Fasilitas modern & lengkap	Meningkatkan kualitas layanan
Teknologi layanan	Proses digital & cepat	Efisiensi logistik & transaksi
Dukungan kebijakan	Program nasional perbatasan	Peningkatan investasi publik
Partisipasi masyarakat	UMKM & pedagang lokal aktif	Peningkatan pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan empat faktor utama yang mendukung efektivitas PLBN Aruk: (1) infrastruktur yang memadai, (2) teknologi layanan, (3) kebijakan pemerintah, dan (4) partisipasi masyarakat. Pengelola PLBN menyatakan bahwa *“bangunan PLBN Aruk sangat megah, lengkap, dan terawat sehingga membuat pelayanan lebih nyaman dan profesional”* (Wawancara Pengelola PLBN, 2024). Kondisi fisik yang baik merupakan prasyarat bagi aktivitas ekonomi yang efisien sesuai dengan prinsip *islāh* (perbaikan dan efisiensi) dalam ekonomi Islam.

Selain itu, digitalisasi sistem layanan mempercepat proses pemeriksaan orang dan barang sehingga menurunkan biaya transaksi. Pemerintah juga menunjukkan komitmen melalui kebijakan nasional perbatasan yang memasukkan PLBN sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi dan kedaulatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam membuka usaha kecil, menyediakan jasa transportasi, atau bekerja di sektor formal

PLBN memperkuat basis ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan *tamkīn* (pemberdayaan) dalam pembangunan Islam. Penelitian sebelumnya oleh (Perbatasan), 2023) menegaskan bahwa PLBN yang berhasil di Indonesia selalu didukung oleh infrastruktur memadai dan partisipasi sosial-ekonomi masyarakat. Artinya, temuan ini konsisten dengan bukti empiris dan teori pembangunan yang relevan

2. Faktor Penghambat

Meski memiliki banyak faktor pendukung, pengembangan PLBN Aruk juga menghadapi beberapa hambatan penting. Pertama, kurangnya koordinasi antarlembaga. Dalam wawancara pengelola disebutkan bahwa koordinasi masih lemah karena “hubungan kerja antarlembaga belum terjalin solid, dan setiap instansi masih berjalan dengan komando masing-masing”. Hambatan ini mengakibatkan ketidakefisienan layanan dan memperlambat pengawasan aktivitas lintas batas. Dari perspektif ekonomi Islam, lemahnya koordinasi ini menghambat prinsip al-‘adālah (keadilan pelayanan publik) dan mengurangi efektivitas pembangunan

Hambatan kedua adalah aktivitas ilegal yang masih terjadi di sekitar perbatasan, seperti penyelundupan barang atau keluar-masuk non-resmi. Pengelola PLBN menegaskan adanya “peningkatan volume pengawasan akibat ancaman penyelundupan barang dan jalur tikus”. Aktivitas ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menolak *mafsadah* (kerusakan ekonomi) serta melarang praktik perdagangan yang merugikan pihak lain.

Hambatan ketiga adalah terbatasnya kapasitas ekonomi dan keterampilan masyarakat. Sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan peluang usaha secara optimal karena keterbatasan modal, literasi bisnis, dan akses pelatihan. Wawancara masyarakat menunjukkan bahwa banyak pedagang masih menghadapi keterbatasan modal dan belum terhubung dengan lembaga keuangan formal. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, penghambat ini mengindikasikan perlunya *tamkīn* (pemberdayaan) agar masyarakat dapat mengakses sumber daya secara adil.

Hambatan keempat adalah minimnya diversifikasi usaha lokal, di mana aktivitas ekonomi masih terpusat pada perdagangan harian dan jasa transportasi. Pengembangan sektor lain, seperti pariwisata, agrobisnis perbatasan, dan kerajinan, belum berjalan optimal. Padahal sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 3.
Faktor Penghambat Pengembangan PLBN Aruk

Faktor	Deskripsi	Dampak Negatif
Koordinasi lemah	Instansi bekerja terpisah	Layanan tidak efisien
Aktivitas ilegal	Penyelundupan melalui jalur tikus	Merusak stabilitas ekonomi
Kapasitas ekonomi rendah	Kurang modal & keterampilan	Tidak memanfaatkan peluang PLBN

Minim diversifikasi usaha	Ekonomi hanya fokus perdagangan kecil	Pertumbuhan lambat
---------------------------	---------------------------------------	--------------------

Meski terdapat banyak faktor pendukung, pengembangan PLBN Aruk juga menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah lemahnya koordinasi antarlembaga. Pengelola PLBN mengungkapkan bahwa “hubungan antar instansi belum solid dan masing-masing instansi masih berjalan dengan komando masing-masing” (Wawancara Pengelola PLBN, 2024). Kelemahan koordinasi ini mengakibatkan ketidakefisienan pelayanan dan tumpang tindih tugas, yang bertentangan dengan prinsip al-‘adālah (keadilan) dan efisiensi dalam ekonomi Islam.

Hambatan kedua adalah aktivitas ilegal seperti penyelundupan melalui jalur tikus. Hal ini bukan hanya mengganggu stabilitas ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan nilai Islam yang melarang mafsadah (kerusakan) dan praktik ekonomi yang merugikan. Petugas menyatakan bahwa “penyelundupan barang-barang tertentu tetap terjadi karena pengawasan belum optimal” (Wawancara Petugas PLBN, 2024). Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha, seperti keterbatasan modal, literasi bisnis, dan akses pembiayaan.

Penelitian terdahulu (Bara Lay & Wahyono, 2018) juga menemukan bahwa PLBN Motaain menghadapi tantangan yang mirip: lemahnya koordinasi pemerintah, aktivitas ilegal di jalur perbatasan, dan rendahnya kapasitas UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan yang dialami PLBN Aruk bukanlah kasus tunggal, tetapi merupakan pola struktural yang terjadi pada banyak PLBN di Indonesia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif PLBN Aruk selaras dengan prinsip dasar ekonomi pembangunan Islam yang menekankan:

- 1) Masalah sebagai tujuan utama,
- 2) pemerataan akses ekonomi,
- 3) penguatan kapasitas masyarakat (ummah empowerment),
- 4) penghindaran praktik merugikan (mafsadah), dan
- 5) tata kelola yang adil.

Namun, hambatan berupa koordinasi yang lemah, penggunaan jalur ilegal, serta rendahnya kapasitas usaha masyarakat dapat mengurangi efektivitas masalah tersebut. Dengan demikian, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih holistik: integrasi tata kelola, pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi nilai ekonomi Islam. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa PLBN Aruk telah memberikan dampak nyata bagi ekonomi perbatasan, tetapi optimalisasi manfaatnya hanya dapat dicapai melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi pembangunan Islam

PENUTUP

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat wilayah

perbatasan. Peningkatan aktivitas perdagangan, munculnya peluang usaha baru, memperbaikinya aksesibilitas barang dan jasa, serta bertambahnya kesempatan kerja menunjukkan bahwa PLBN berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak tersebut selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan Islam seperti *masalahah*, *taysir*, *hifz al-māl*, dan *falāh*, yang menekankan pentingnya kemudahan akses, peningkatan kesejahteraan, keamanan ekonomi, serta distribusi manfaat pembangunan secara adil. Selain itu, pengembangan PLBN juga memperkuat konektivitas sosial dan membuka ruang kerja sama lintas batas yang memperluas jaringan ekonomi masyarakat perbatasan.

Namun demikian, optimalisasi manfaat pembangunan PLBN Aruk masih menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait lemahnya koordinasi antarlembaga, keberadaan aktivitas ilegal seperti penyelundupan, keterbatasan kapasitas ekonomi masyarakat, dan minimnya diversifikasi usaha lokal. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja belum cukup untuk mewujudkan tujuan pembangunan Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM, serta sinergi kebijakan lintas instansi agar PLBN Aruk dapat memberikan manfaat yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi pembangunan Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, I. A., & Kusnadi, I. (2019). Peluang dan tantangan dibukanya border Aruk ditinjau dari aspek ekonomi. *Jurnal SEBI: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Bara Lay, J. R., & Wahyono, H. (2018). Dampak pengembangan PLBN Motaain pada kawasan perbatasan RI–RDTL. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*.
- Djumadi. (2016). *Konsep pembangunan ekonomi perspektif Islam*.
- Faizah, A. (2023). *Dukung perekonomian di wilayah perbatasan, PLBN Aruk optimalkan BMN*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Firdaus. (2021). *Dampak pembangunan PLBN Aruk terhadap aksesibilitas dan ekonomi masyarakat* (pp. 109–122).
- Juanina, Y. W. (2022). *Proses pengembangan PLBN Motaain dan dampaknya bagi masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu* [PhD Thesis]. Universitas Amikom Yogyakarta.
- Mahri, A. J. W. (2021). Kompilasi ekonomi pembangunan Islam. In M. I. S. (Ed.), *Ekonomi Pembangunan Islam* (p. 6).
- Maisondra. (2019). *Strategi dan dampak pembangunan kawasan PLBN Entikong dalam meningkatkan perdagangan dan keamanan wilayah Indonesia*.
- Negeri, B. S. K. L. (2022). *Prospek dan permasalahan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur*. BSKLN.
- Perbatasan), B. (badan N. P. (2023). *Mengenal PLBN Aruk di Perbatasan RI–Malaysia*.
- Sari, W. P. (2020). *Perkembangan PLBN dan dampaknya terhadap penguatan kapasitas perbatasan Indonesia–Malaysia*.

Wawancara

- Wawancara Pengelola PLBN Aruk. (2024).
- Wawancara Pedagang Lokal Aruk. (2024).
- Wawancara Masyarakat Perbatasan Aruk. (2024).
- Wawancara Tokoh Masyarakat Aruk. (2024)